

ANALISA

Tahun V No. 6

JUNI 1976

UTARA - SELATAN & TIMUR - BARAT



TAHUN V No. 6
JUNI 1976

UTARA - SELATAN
&
TIMUR - BARAT

seri ANALISA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Phone 56532/35

PENGANTAR PENERBIT

Berbicara mengenai UTARA-SELATAN & TIMUR-BARAT sebagaimana judul penerbitan ANALISA edisi tahun V No. 6 kali ini tidaklah dimaksudkan untuk berbicara mengenai mata angin sebagaimana biasa dijumpai dalam pembahasan ilmu bumi, tetapi adalah suatu pengamatan terhadap pola hubungan internasional yang dewasa ini makin menjadi bertambah kompleks sifatnya.

Masalah TIMUR-BARAT sebagaimana telah lazim diketahui, adalah pola pertentangan internasional yang didasarkan kepada pertentangan ideologi, di antara dua kubu yang saling berhadap-hadapan, yaitu kubu komunisme dengan primadona utama Uni Soviet dan kubu duniabebas dengan primadona utama Amerika Serikat. Sedangkan masalah UTARA-SELATAN adalah suatu fenomena baru dalam pola pertentangan internasional yang lebih didasarkan kepada kepentingan ekonomi, khususnya di antara negara-negara industri maju dengan negara-negara sedang berkembang. Penelitian kedua masalah itu sangat kompleks sifatnya dan luas sekali jangkauannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami membatasi diri dengan menyajikan tulisan Nurdjaman ARSJAD dengan judul "Peranan UNCTAD dan OPEC : Kerjasama atau Konfrontasi?" dan tulisan O. Abdul RACHMAN dengan judul "Perspektif Sekuriti di Samudera Indonesia".

Nurdjaman ARSJAD mendasarkan tulisannya kepada pengamatan atas aspek ekonomi dan organisasi-organisasi internasional, khususnya dalam hal ini UNCTAD dan OPEC. Dikemukakan di situ, secara garis besar, perkembangan kedua organisasi dan mekanisme kelembagaan serta permasalahan dan hasil yang telah dicapai. Sedangkan O. Abdul RACHMAN memulai dengan uraian mengenai persaingan kekuatan militer Amerika Serikat - Uni Soviet, khususnya di kawasan Samudera Indonesia, dalam rangka menunjang perang dingin pola bipolar yang berlaku pada masa lampau. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai situasi dan kondisi negara-negara di sekitar Samudera Indonesia, peranan bahan mentah dan pangan, serta fungsi lautan dan selat dalam strategi percaturan internasional.

Segi yang menarik dari kedua tulisan itu, walaupun dibuat sendiri-sendiri secara terpisah adalah, bahwa kedua penulis sampai kepada satu kesimpulan yang sama, yaitu perlunya negara-negara sedang berkembang untuk tidak mengandalkan, apalagi menggantungkan usaha pembangunannya dari ada-tidaknya bantuan luar negeri. Perlunya negara-negara sedang berkembang untuk menyusun suatu model pembangunan yang lebih didasarkan atas kenyataan riil potensi dan kemampuan serta keyakinannya sendiri dengan mempertahankan solidarisme dan koordinasi langkah-langkah bersama di antara negara-negara 'senasib'. O. Abdul RACHMAN menambahkan pula perlunya negara-negara di dunia, di dalam usaha mereka untuk menjaga kestabilan dan kelanggengan planet yang satu ini, untuk tidak hanya sekedar memahami adanya perubahan pola bipolar menjadi multipolar, tetapi juga bersedia dan mampu menerapkan pola berpikir multipolar di dalam usaha mereka mencari jawaban dari permasalahan yang sedang berkembang.

Untuk melengkapi pemahaman permasalahan yang dikemukakan dalam penerbitan kali ini, khususnya yang berkenaan dengan kawasan Samudera Indonesia, maka dilampirkan pula salinan dari beberapa keputusan organisasi dunia PBB di dalam kerangka usaha netralisasi Samudera Indonesia, dan juga keputusan negara-negara anggota kerjasama regional ASEAN yang dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur, yang merupakan bagian dari usaha konkrit ke arah pembentukan kawasan Samudera Indonesia yang damai, netral dan bebas.

Semoga tulisan-tulisan dalam penerbitan ini dapat bermanfaat bagi para Pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	iii
 <i>PERANAN UNCTAD DAN OPEC : KERJASAMA ATAU KONFRONTASI ?</i>	
<i>N. ARSUJAD</i>	1
 <i>PERSPEKTIF SEKURITI DI SAMUDERA INDONESIA</i>	
<i>O. Abdul RACHMAN</i>	15
 <i>Lampiran</i>	
 I. Resolution adopted by the General Assembly : Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace	33
II. General Assembly Resolution 3080 (XXVIII) of 6 December 1973	36
III. Kuala Lumpur Declaration	38
IV. Straits and Channels in and adjoining the Indian Ocean	41

PERANAN UNCTAD DAN OPEC: KERJASAMA ATAU KONFRONTASI?

N. ARSJAD

PENDAHULUAN

Di bulan Mei tercatat dua peristiwa penting yang tentunya akan mempunyai pengaruh besar atas perkembangan ekonomi dunia. Satu, adalah pertemuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang diadakan di Bali dan yang lain adalah konperensi PBB yang ke-IV tentang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) di Nairobi, Kenya, Afrika. Pertemuan yang disebut terakhir ini dihadiri oleh hampir semua bangsa-bangsa anggota PBB, baik dari kelompok negara-negara Barat, kelompok negara-negara berkembang, maupun kelompok negara-negara komunis. Sebelum kelompok negara-negara berkembang datang ke konperensi UNCTAD ke-IV di Nairobi itu, kelompok itu terlebih dahulu telah mengadakan pertemuan tingkat Menteri (dikenal dengan nama sidang Kelompok 77) di Manila. Pertemuan Manila (26 Januari 1976 - 6 Pebruari 1976) merupakan persiapan terakhir negara-negara berkembang untuk menentukan posisi bersama dalam menghadapi negara-negara maju di Nairobi. Sidang kelompok 77 wilayah Asia dalam UNCTAD, sebelum bertemu dengan kelompok 77 wilayah Afrika dan Amerika Latin di Manila, telah pula mengadakan sidang di Jakarta bulan Januari yang lalu.

Nampaknya, secara lahiriah, antara dua pertemuan besar itu tidak ada kaitannya sama sekali, dan membahas pokok persoalan yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya, dua konperensi itu mempunyai satu persamaan yang mendasar yaitu bahwa di dalam dua konperensi tersebut bangsa-bangsa di dunia sedang berusaha mencari bentuk kerjasama yang saling menguntungkan guna mewujudkan kemakmuran dunia yang adil dan merata.

Terutama bagi negara-negara berkembang yang biasa juga disebut negara-negara "Dunia Ketiga", usaha-usaha ke arah terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik, harmonis dan bekerjasama, masih harus diperjuangkan terus. Memang, ini bukanlah satu hal yang gampang, sebab walaupun tidak ada satupun di antara bangsa-bangsa yang tidak setuju akan "kerjasama", namun adalah sukar untuk mewujudkannya. Perbedaan-perbedaan sikap, politik, pandangan, kepentingan, pengalaman dan filosofi masing-masing negara itulah yang menjadi penghambat utama untuk terwujudnya suatu kerjasama internasional yang serasi.

OPEC DAN UNCTAD: SEJARAH DAN IDENYA

Negara-negara pengeksport minyak yang sekarang bergabung dalam OPEC adalah Arab Saudi, Kuwait, Iran, Persatuan Negara-negara Emirat Arab, Qatar, Irak, Libya, Aljazair, Nigeria, Venezuela, Equador dan Indonesia. Negara-negara tersebut di atas merupakan negara-negara anggota OPEC yang berstatus penuh, mempunyai hak memilih, hak untuk memveto dan berkewajiban untuk mentaati kebijakan-kebijakan seperti yang digariskan OPEC. Ada pula negara anggota yang berstatus "associate member" yaitu Gabon yang mempunyai hak memilih tetapi tidak mempunyai hak untuk memveto. Di samping itu ada negara-negara anggota yang berstatus "peninjau" (observer) yaitu Peru, Trinidad, dan Tobago. Status peninjau ini harus diperbaharui kembali dalam setiap pertemuan OPEC berikutnya. Sementara itu Meksiko yang sudah mulai mengeksport minyaknya telah mengajukan keinginannya untuk menjadi negara-negara anggota OPEC.

Kerjasama OPEC ini belum dapat disebut "kartel", sebab kedaulatan masih dipunyai negara-negara anggota, akan tetapi ada semacam kewajiban moral untuk mentaati keputusan-keputusan konperensi sebagai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi. Organisasi negara-negara pengeksport minyak ini didirikan pada tahun 1960 (kemudian negara-negara Arab pengeksport minyak juga mendirikan OAPEC pada tahun

1968) dengan tujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan, serta melindungi dan menjamin kepentingan negara-negara anggota pada umumnya.

Di dalam OPEC terdapat Dewan Gubernur yang bertugas langsung mengatur organisasi, melaksanakan resolusi-resolusi yang diajukan dalam konperensi OPEC, dan menyusun anggaran tahunan. Gubernur-gubernur ini terdiri atas wakil-wakil negara-negara anggota, diangkat untuk dua tahun lamanya. Pertemuan pleno Dewan Gubernur diadakan minimal dua tahun sekali. Ketua Dewan Gubernur pada tahun 1974 adalah Dr. Abdullah Al-Sayyab dari Irak. Di samping Dewan Gubernur, terdapat pula satu Sekretariat Jenderal yang mengkoordinir kegiatan sehari-hari bidang administrasi, ekonomi dan keuangan, informasi, teknik, statistik dan kesekretariatan. Jabatan Sekretaris Jenderal untuk periode 1975-1977 dipegang oleh Meschach Feyide dari Nigeria.

Lahirnya OPEC ini juga turut memperkuat "bargaining position" masing-masing negara penghasil minyak terhadap perusahaan-perusahaan raksasa multinasional di bidang perminyakan yang sebelumnya sangat menentukan kebijakan penyediaan dan penjualan minyak internasional. Perusahaan-perusahaan raksasa multinasional minyak yang paling besar dewasa ini adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu: (1) Exxon (sebelumnya disebut Standard Oil Company, New Jersey), (2) Mobil (sebelumnya disebut Socony Vacuum Oil Company), (3) Gulf (Gulf Oil Corporation), (4) Texaco (sebelumnya disebut The Texas Company), (5) Socal (Standard Oil Company of California), (6) B.P. (British Petroleum Company, Ltd.) dan (7) Shell (Royal Dutch Petroleum Company and Shell Transport and Trading). Ketujuh perusahaan raksasa ini terkenal dengan julukan "The Seven Sisters".

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah lembaga permanen PBB sebagai organ dari Majelis Umum PBB. UNCTAD didirikan dengan resolusi bulan Desember 1964, bukan merupakan lembaga khusus PBB (UN - Specialized Agency) seperti IMF, World Bank, FAO, UNESCO,

ILO, dan sebagainya, melainkan suatu forum pertemuan negara-negara anggota PBB yang kegiatan-kegiatannya lewat konperensi. Supaya lembaga UNCTAD menjadi efektif, dibentuklah Sekretariat Jenderal yang berkedudukan di Jenewa. Sekretaris Jenderal yang pertama adalah Dr. Raul Prebisch (dari Argentina) seorang genius yang disegani karena ketajaman pikirannya dan banyak jasanya kepada UNCTAD. Tesisnya yang terkenal: "The Theory of Peripheral Economy" (teori tentang perekonomian daerah "pinggiran"), walaupun kerap dikritik, namun telah banyak membantu mereka yang ingin mengetahui posisi negara-negara berkembang (countries of the "periphery"). Teori Dr. Prebisch ini juga telah banyak sumbangannya kepada perkembangan teori ekonomi pembangunan. Sekretaris Jenderal UNCTAD berikutnya adalah Dr. Perez Guerrero, dan Sekretaris Jenderal yang sekarang adalah Gamani Corea dari Sri Lanka.

Walaupun bangsa-bangsa yang bertemu di forum UNCTAD bukan semata-mata dari negara-negara berkembang, namun UNCTAD didirikan untuk kepentingan negara-negara berkembang, dan memang, terbentuknya UNCTAD adalah hasil perjuangan negara-negara berkembang di dalam waktu yang cukup lama. UNCTAD adalah suatu forum yang anggotanya sangat luas, karena semua negara-negara anggota PBB ikut serta dalam forum UNCTAD, tidak seperti halnya dengan lembaga IMF atau World Bank di mana tidak seluruh negara-negara anggota PBB menjadi anggota kedua badan tersebut. Menurut catatan, tahun 1975 terdapat 147 negara-negara menjadi anggota UNCTAD.

UNCTAD didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan secara bertahap sejumlah kebijakan yang terkoordinasikan dan yang harus disetujui negara-negara anggota, guna menunjang lancarnya akselerasi pembangunan negara-negara berkembang. Rumusan tujuan yang seperti itu mengandung segi-segi yang luas yaitu meliputi segala spektrum kebijakan negara-negara maju maupun kebijakan negara-negara berkembang itu sendiri, yang dapat mempengaruhi perdagangan dan pembayaran luar negeri serta pembangunan ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya.

Usaha-usaha untuk merintis pembentukan lembaga UNCTAD telah lama dilakukan. Konperensi PBB tentang perdagangan dan kesempatan kerja (UN Conference on Trade and Employment) yang diadakan di Havana (21 Nopember 1947 - 24 Maret 1948), dapat dipandang sebagai usaha pendahuluan ke arah

terbentuknya UNCTAD. Semula, konperensi Havana itu akan membentuk "Organisasi Perdagangan Internasional" (International Trade Organization = ITO). Akan tetapi nampaknya tidak ada titik pertemuan pendapat antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka ITO tidak pernah terwujud dan sebagai gantinya lahirlah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947.

Walaupun ITO tidak pernah terwujud, namun cita-cita untuk membentuk suatu organisasi atau forum tempat bangsa-bangsa dapat bertemu untuk membicarakan kerjasama internasional dalam segala seginya: perdagangan, pembayaran, kredit, keuangan, perkapalan, asuransi, transport, dan lain sebagainya, selalu diperjuangkan. Pada akhirnya sebagai hasil perjuangan yang panjang dan lama, lahirlah UNCTAD pada tahun 1964 dan telah mengadakan sidangnya (istilahnya session) yang pertama di Jenewa, pada tanggal 23 Maret - 16 Juni 1964, sidangnya yang kedua (1 Februari - 29 Maret 1968) diadakan di New Delhi, sedangkan yang ketiga (13 April - 21 Mei 1972) diadakan di Santiago. Sidang yang paling akhir ini, yang keempat, diadakan di Nairobi (5 - 31 Mei 1976).

Supaya kegiatan UNCTAD tidak terputus, maka kegiatan di antara dua konperensi (semacam pleno) dilakukan oleh "Trade and Development Board", bersama-sama dengan beberapa Komite yang dibentuk menurut kebutuhan setiap tahunnya. Dewan Perdagangan dan Pembangunan beserta Komite-komitennya itu sering juga mengadakan sidang-sidangnya tersendiri yang dihadiri pula oleh utusan-utusan negara-negara anggota UNCTAD.

KEKUATAN BARU DUNIA KETIGA

OPEC adalah lambang kebangkitan Dunia Ketiga yang sekarang mulai menyadari bahwa sebenarnya dirinya mempunyai kekuatan di dalam pergaulan kehidupan dunia. Di tahun-tahun akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa meskipun negara-negara pengekspor minyak terbesar, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Iran belum mungkin menjadi negara "super power", namun posisi negara-negara tersebut harus diperhitungkan dan pendapat mereka harus didengar.

Karena situasi perkembangannya, antara lain peristiwa perang Arab-Israel, aksi-aksi negara-negara Arab khususnya, negara-negara pengeks-
por minyak lainnya pada umumnya, telah berhasil menentukan "bargaining
position" terhadap negara-negara maju. Ini merupakan suatu pelajaran
dan pengalaman bahwa ternyata negara-negara Dunia Ketiga memiliki po-
tensi kekuatan dalam posisi bersaing pada perdagangan internasional. Le-
tak kekuatan OPEC ialah pada kemampuan mereka dalam mengekspor minyak
dan memonopoli pasaran internasional. Sebagai kekuatan baru, negara-ne-
gara pengekspor minyak yang tergabung ke dalam OPEC ternyata sanggup
mengubah pola ekonomi dunia yang berlaku pada tahun-tahun 1960-an. Ke-
lompok negara-negara pengekspor minyak itu dengan kekayaan minyak mere-
ka yang melimpah itu telah dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi negara-
negara industri kaya.

Untuk jangka waktu puluhan tahun yang mendatang, diperkirakan mi-
nyak bumi masih menempati kedudukan dominan sebagai sumber energi utama.
Alternatif sumber energi lainnya masih belum mampu bersaing dengan mi-
nyak bumi baik karena: (i) biaya eksploitasinya mahal (sumber tenaga
atom dan sumber minyak yang berasal dari sejenis batu-"shale oil"), (ii)
penggunaannya yang tidak praktis (batubara), maupun (iii) tidak cukup-
nya persediaan (LNG dan sumber tenaga air). Dengan demikian kebutuhan
dunia akan sumber energi sebagian besar masih dilayani oleh minyak bumi.

Hampir dapat dipastikan bahwa permintaan negara-negara industri
akan minyak bumi, akan lebih meningkat lagi di waktu-waktu mendatang,
yaitu apabila negara-negara industri kaya dapat mengatasi resesi indus-
tri dalam negeri mereka. Bila pembatasan konsumsi pemakaian minyak bumi
sukar dilakukan, maka semakin tinggi lagi ketergantungan negara-negara
seperti Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang, akan minyak bumi.

Kalangan politisi maupun para ahli negara-negara Barat sangat
mengecam sikap negara-negara Arab pengekspor minyak yang melakukan po-
litik embargo minyak di dalam rangka ikhtiar mereka memenangkan perang.
Hal itu terjadi di akhir tahun 1973. Walaupun pada tahun 1974 negara-
negara Arab telah mengendorkan embargo minyak mereka, telah melonggar-
kan kembali penyediaan minyak mereka untuk negara-negara industri kaya,

namun harga minyak telah dinaikkan yaitu dari US\$ 2,29 per barrel menjadi US\$ 11,65 per barrel. Kenaikan harga minyak ini dipandang sebagai penyebab utama timbulnya inflasi yang telah meluas menjadi inflasi dunia.

Apa yang dikatakan kalangan politisi Barat itu tidak seluruhnya benar. Inflasi sudah berjangkit jauh sebelum harga minyak dinaikkan. Menurut Sheikh Ahmad Zaki Yamani, Menteri Perminyakan dan Bahan Tambang Arab Saudi, kenaikan harga minyak hanya menyumbang di sekitar 1% sampai 2% kepada pola inflasi yang terjadi sekarang¹. Sebenarnya, negara-negara pengekspor minyak merasakan bahwa harga sebelumnya dari minyak yang mereka ekspor terlalu rendah, sedangkan harga barang-barang industri adalah mahal. Negara-negara industri kaya dituduh telah mendasarkan pola kemakmuran masyarakatnya pada minyak murah negara-negara berkembang. Krisis moneter dunia (tahun 1970 dan 1971) telah mengubah harga-harga, sedangkan harga minyak pada waktu itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan harga-harga yang berlaku. Jadi penetapan harga minyak yang sekarang berlaku dipandang sudah wajar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC itu mempunyai "power" yang ruang lingkupnya bersifat global. Mereka mampu untuk "memaksa" negara-negara kaya mengubah kebijakan luar negerinya. Bahkan tidak mustahil OPEC sebagai satu kekuatan yang bersatu itu nantinya dapat "menggiring" negara-negara maju ke arah tuntutan-tuntutan yang adil dari Dunia Ketiga baik dalam bidang perdagangan, sumber-sumber bahan mentah, investasi internasional, kredit maupun bantuan luar negeri.

Kekuatan yang dimiliki negara-negara pengekspor minyak yang telah membentuk semacam "kartel" itu akan merangsang negara-negara berkembang lainnya yang juga menghasilkan bahan-bahan mentah dan bahan baku lainnya (yang tidak kalah peranannya dibanding dengan peranan minyak),

¹ *Newsweek*, 7 Oktober 1974

seperti kayu, karet alam, nikel, bauksit, timah, wolfram, dan kobalt, untuk membentuk satu ikatan yang bersatu dan berkekuatan. Dengan demikian martabat Dunia Ketiga akan lebih tinggi lagi di forum internasional.

TANTANGAN YANG DIHADAPI OPEC

OPEC sebagai satu kekuatan baru dihadapkan oleh tiga tantangan di dalam hubungannya dengan penggalangan pergaulan dunia yang harmonis dan stabil.

Pertama, adalah apakah ia dapat turut memelihara kestabilan pertumbuhan kehidupan dunia baik di dalam arti politis maupun di dalam arti ekonomis. Hal ini berarti OPEC harus dapat menghindari sikap yang bersifat konfrontatif di dalam menghadapi negara-negara "utara". Politik konfrontasi bisa menimbulkan akibat bahwa negara-negara maju akan menjalankan politik membatasi impor, politik diskriminasi dan proteksi yang luas. Dalam hubungannya dengan hal tersebut ada suatu pendapat yang ekstrim yaitu bahwa negara-negara industri kaya dianjurkan bersikap keras untuk memaksa negara-negara pengekspor minyak untuk melakukan transaksi sesuai dengan syarat yang ditentukan sepihak. Bahkan ada pula gagasan "gila" yaitu bahwa apabila negara-negara Arab tetap menjalankan politik kaku sehingga akan mengakibatkan depresi ekonomi, maka dianjurkan sebaiknya negara-negara industri maju mengadakan intervensi militer.

Dilihat dari sudut hal-hal tersebut di atas, sikap negara-negara pengekspor minyak yang bertemu di Bali bulan Mei ini adalah sudah jelas. Keputusan sidang OPEC di Bali yang antara lain menunda kebijaksanaan menaikkan harga minyak mungkin dapat dipandang sebagai adanya keinginan untuk menciptakan iklim yang baik dalam kehidupan dunia. Dilihat dari sudut antar anggota negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC itu sendiri, keputusan OPEC di Bali merupakan bukti adanya solidaritas yang tinggi, walaupun mungkin banyak di antara negara-negara anggota, untuk kepentingan ekonomi dalam negeri mereka, memerlukan ditingkatkannya penerimaan devisa dari minyak.

Tantangan yang kedua adalah bahwa negara-negara yang tergabung dalam OPEC harus mempunyai kesadaran moral untuk membantu negara-negara berkembang lainnya yang memerlukan bantuan, khususnya negara-negara yang sekarang populer dengan nama, negara-negara "MSA" (most-seriously affected countries). Negara-negara MSA adalah negara-negara yang secara serius mudah terkena pengaruh kesulitan-kesulitan ekonomi yang melanda dunia pada akhir-akhir ini, termasuk adanya krisis energi internasional. Negara-negara semacam itu adalah negara-negara yang "ketahanan" ekonominya sangat lemah. Negara-negara semacam itu biasanya disebut negara-negara yang sangat "miskin" yang pendapatan per kapita mereka di bawah US\$ 200 setahun, tidak memiliki kekayaan minyak bumi dan tidak banyak memiliki sumber-sumber bahan mentah lainnya. Bahkan mereka masih banyak mengimpor bahan makanan yang harganya mahal sekali. Negara-negara kelompok ini bukan saja dijumpai di wilayah Asia, tetapi juga tersebar di wilayah Afrika dan Amerika Latin, terutama di Afrika Sahel dan Asia bagian selatan. Pada tahun 1974, OPEC (kecuali Indonesia dan Equador) telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan, dan komitmen bantuan OPEC secara bilateral adalah sebesar US\$ 5,9 milyar sedangkan secara multilateral mencapai sebesar US\$ 1,6 milyar. Kurang lebih 40% dari bantuan bilateral ditujukan kepada negara-negara MSA, sedangkan 60% lagi diberikan kepada negara-negara Arab lainnya yang memerlukan bantuan. Penerima bantuan terbesar adalah Mesir dan Syria.

Tantangan yang ketiga adalah bahwa OPEC tentunya harus benar-benar dapat menciptakan kemakmuran yang adil dan merata bagi bangsa mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan hal ini adalah menarik bila diikuti pendapat Raja Arab Saudi, almarhum Raja Faizal¹. Almarhum Raja Faizal pernah mengatakan bahwa dengan bertambahnya petro-dollar yang dimiliki negara-negara Arab bukan berarti negara-negara Arab sudah merasa bahagia. Seperti diketahui, sebenarnya, keadaan negara-negara Arab, khususnya negara Arab Saudi, masih belum maju. Negara Arab Saudi ingin sekali melihat perekonomiannya terbangun, banyak didirikan industri-industri, jalan-jalan dan prasarana lainnya, termasuk kesehatan dan pendidikan.

¹ Newsweek, 10 September 1974

KEDUDUKAN NEGARA-NEGARA DUNIA KETIGA DI FORUM UNCTAD

Sejak selesainya Perang Dunia II ada semacam perasaan "tidak puas" dari kelompok negara-negara berkembang terhadap perkembangan ekonomi internasional. Perasaan tidak puas di dalam manifestasinya mengambil bentuk dalam sikap tidak senang pada negara-negara industri kaya yang sebenarnya dalam banyak hal dapat menentukan terwujudnya suatu kemakmuran dunia yang adil dan merata. Di dalam perkembangannya dapat dilihat bahwa seakan-akan telah terjadi krisis hubungan antara "Utara" dan "Selatan" yang semakin meningkat. Bahkan di suatu waktu pernah menjurus ke arah "konfrontasi" yang keras.

Pengaruh negara-negara maju terhadap perkembangan ekonomi negara-negara berkembang bukan hanya lewat perdagangan, investasi dan bantuan internasional saja, tetapi sebenarnya juga lewat kegiatan-kegiatan di bidang politik, militer, moneter internasional, kebijakan kurs (exchange rate), ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Di dalam pergaulan dan kerjasama internasional, segala kegiatan negara-negara maju yang mempunyai "impact" (sentuhan pengaruh) terhadap negara-negara berkembang, seharusnya diusahakan sedemikian rupa, sehingga turut mempercepat pembangunan negara-negara Dunia Ketiga.

Di dalam perkembangannya, sistem dan struktur ekonomi internasional belum menguntungkan buat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Negara-negara kaya makin bertambah kaya, negara-negara miskin makin bertambah "anak". Bagian negara-negara berkembang di dalam perdagangan dunia semakin menurun, dan kondisi pertukaran (terms of trade) negara-negara berkembang semakin merugi. Politik proteksi negara-negara maju semakin menekan, terutama bagi barang-barang hasil industri (misalnya tekstil) negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun 1960-an pendapatan per kapita negara-negara kaya naik di sekitar US\$ 650, sedang pendapatan per kapita negara-negara berkembang hanya naik di sekitar US\$ 40.

Investasi-investasi swasta negara-negara kaya, lebih banyak dilakukan di wilayah antar negara mereka sendiri daripada di negara-negara berkembang. Bantuan keuangan negara-negara maju makin jauh dari 1% GNP mereka. Bantuan tersebut lebih banyak didasarkan kerelaan negara-negara kaya daripada didasarkan kepada kebutuhan negara-negara berkembang. Pemindahan sumber-sumber daya ke negara-negara berkembang hanyalah merupakan pemindahan teknologi, sistem pendidikan, bantuan dana dan lain sebagainya, yang tidak berdasarkan suatu pola yang disepakati bersama, sehingga hasilnya kurang memadai bagi negara-negara penerima.

Lembaga-lembaga yang mendorong kelancaran perdagangan internasional, seperti GATT, ternyata lebih berorientasi kepada kebutuhan negara-negara industri kaya. Pemotongan-pemotongan tarif dalam rangka persetujuan GATT tidak membawa efek yang berarti atas perdagangan negara-negara berkembang. Faktor yang lebih banyak menghalangi perluasan perdagangan negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah masalah tarif akan tetapi penyebabnya lebih banyak terletak pada kurang kuatnya permintaan akan komoditi-komoditi negara-negara berkembang.

Walaupun terdapat tanda-tanda bahwa negara-negara kaya pada tahun-tahun belakangan ini akan lebih memperhatikan lagi keinginan dan kepentingan negara-negara berkembang, namun nampaknya kemauan politik negara-negara maju masih jauh dari yang diharapkan. Perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan GATT di Tokyo bulan September 1974, telah melahirkan "Deklarasi Tokyo" yang isinya suatu janji negara-negara maju untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang. Peristiwa ini merupakan suatu kemajuan yang menggembirakan bagi kepentingan negara-negara berkembang dalam menuntut hak mereka yang wajar dan adil.

Hingga diselenggarakannya konperensi UNCTAD ke-IV di Nairobi bulan Mei 1976, ternyata janji-janji negara-negara kaya tersebut belum seluruhnya terwujud dan memuaskan. Usaha-usaha mencari penyelesaian dan kerjasama internasional di dalam perdagangan dan pembangunan hampir mengalami jalan buntu. Namun demikian, setelah melalui serangkaian perundingan-perundingan yang panjang, lama dan melelahkan (tiga minggu lamanya), pada

akhirnya melalui perundingan informil tingkat menteri terbatas, konperensi UNCTAD ke-IV tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan konsensus.

Ada dua masalah pokok yang diperdebatkan dalam konperensi UNCTAD tersebut, yaitu: (i) masalah komoditi dan (ii) masalah hutang. Masalah komoditi merupakan masalah yang paling pokok dan sulit yang dihadapi konperensi UNCTAD. Selama 20 tahun, masalah komoditi belum pernah dapat dipecahkan secara memuaskan dalam bentuk suatu konsepsi yang menyeluruh, di mana selama ini selalu terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang sangat besar antara pandangan negara-negara berkembang dan pandangan negara-negara maju. Masalah lain yang pemecahannya hampir menemui jalan buntu dalam konperensi, ialah masalah keuangan dan moneter, terutama masalah hutang.

Seperti diketahui, negara-negara berkembang yang tergabung ke dalam kelompok 77 mendasarkan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan mereka atas dasar "Deklarasi Manila". Di bidang komoditi, kelompok 77 mengajukan konsep "program komoditi yang terpadu" (integrated programme for commodities) serta terutama konsep "dana bersama" (common fund) sebagai unsur utamanya yang menunjang program tersebut. Program komoditi terpadu (beserta konsep dana bersamanya) adalah suatu konsep yang ingin memajukan perdagangan internasional yang adil dan wajar.

Deklarasi Manila menghendaki dibentuknya program komoditi terpadu dengan tujuan menjamin stabilitas harga, menjamin negara eksportir maupun negara konsumen bahan mentah dari negara-negara berkembang. Stabilitas tersebut dikaitkan dengan suatu dana bersama (diinginkan sebesar US\$ 1 milyar) yang dibentuk dari sumbangan negara-negara berkembang maupun dari negara-negara maju, guna membiayai stock cadangan tersebut. Program ini mencakup 17 komoditi yang sering mengalami fluktuasi harga yaitu kopi, coklat, teh, gula, kapas, karet, sisal, yute, tembaga, timah, gandum, beras, pisang, daging, wol, bauksit dan biji besi.

Tuntutan dasar kelompok 77 di bidang hutang antara lain mengenai peringanan-peringanan yang drastis terhadap beban hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju termasuk usul penghapusan atau

moratorium bagi hutang resmi, konsolidasi hutang-hutang komersial, dan lain-lain. Kelompok 77 juga menuntut suatu "Konferensi Internasional" antara negara-negara pemberi kredit dan negara-negara penerima kredit, supaya disusun patokan-patokan umum bagi penyelesaian masalah hutang, serta diadakan tindakan-tindakan tertentu guna merombak sistem moneter.

Walaupun pada akhirnya tuntutan-tuntutan kelompok 77 tidak disetujui sepenuhnya, namun bentuk kompromi sebagaimana hasil-hasil konferensi UNCTAD tersebut merupakan kemajuan besar sekali bagi negara-negara berkembang.

Dari pengalaman perjuangan negara-negara berkembang selama ini dapat ditarik pelajaran bahwa unsur persatuan merupakan satu kekuatan besar dalam menentukan sikap untuk menghadapi negara-negara maju. Sikap kelompok 77 pada sidang UNCTAD ke-IV di Nairobi, politik embargo minyak oleh OPEC yang dilakukan di tahun 1973 dan 1974, sikap-sikap positif negara-negara berkembang, yang pada umumnya tidak terpecah, di dalam pertemuan-pertemuan negara-negara non-blok (antara lain turut melahirkan konsepsi Orde Ekonomi Internasional Baru), adalah bukti adanya persatuan dan solidaritas yang tinggi yang sekarang suara mereka didengar dan pandangan mereka diperhatikan.

PENUTUP

Janji-janji negara-negara kaya untuk turut mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga belum memuaskan. Hasilnya di sana-sini masih mengecewakan. Walaupun demikian, belakangan ini terdapat suatu perkembangan yang menggembirakan.

Pengalaman memberi pelajaran bahwa perbaikan nasib suatu negara harus datang dari usaha sendiri. Kerjasama internasional yang menguntungkan harus diperjuangkan. Kesatuan sikap antar negara Dunia Ketiga, solidaritas yang tinggi sangat menentukan dalam perjuangan.

Dilihat baik dari sudut sosial, politik maupun ekonomi, dewasa ini dunia telah banyak mengalami perubahan-perubahan kualitatif. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dewasa ini merupakan suatu petunjuk dimulainya cara baru. Munculnya OPEC sebagai satu kekuatan baru, peranan Kelompok 77 dalam UNCTAD, termasuk suatu peristiwa besar. Kini mulai timbul kepercayaan dan harga diri Dunia Ketiga bahwa sebenarnya mereka mempunyai kekuatan riil untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di forum internasional.

Konperensi OPEC di Bali dan UNCTAD di Nairobi bulan Mei adalah suatu kemenangan negara-negara berkembang, kemenangan di dalam arti bahwa mereka telah dapat melakukan introspeksi diri, di mana mereka telah dapat menciptakan persatuan dan kekompakan yang mengagumkan, serta solidaritas yang meyakinkan di dalam menghadapi negara-negara maju.

Kejadian-kejadian dunia dalam dasawarsa tahun-tahun 1970-an ini adalah suatu tantangan buat OPEC dan Kelompok 77 di dalam memainkan peranan mereka untuk turut menggalang hubungan ekonomi internasional yang harus menggugah hati nurani seluruh bangsa di dunia untuk menyusun sistem dan struktur ekonomi dunia yang lebih baik dan manusiawi.**

PERSPEKTIF SEKURITI DI SAMUDERA INDONESIA

O. Abdul RACHMAN

PENDAHULUAN

Banyak analisa telah diturunkan mengenai "konfrontasi maritim" Amerika Serikat dan Uni Soviet di Samudera Indonesia. Negara-negara di sekitar samudera itu (littoral states) umumnya menanggapi konfrontasi maritim tersebut sebagai faktor yang mengganggu stabilitas kawasan. Konfrontasi tersebut di dalam perkembangannya ternyata mempunyai kaitan erat dengan ketegangan-ketegangan bersenjata dan politik yang terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang mencerminkan pola pertentangan Timur-Barat. Pada saat bersamaan terjadi perkembangan baru, yaitu timbulnya pertentangan yang lebih didasarkan kepada kepentingan ekonomi. Pertentangan itu dikenal dengan istilah pertentangan Utara-Selatan, yang pada hakekatnya merupakan pola pertentangan negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara industri.

Analisa berikut ini akan mencoba membahas beberapa faktor potensiil maupun riil yang dapat mempengaruhi keamanan ataupun stabilitas domestik maupun regional negara-negara di kawasan Samudera Indonesia ditinjau dari dua bentuk pertentangan Timur-Barat dan Utara-Selatan yang sekarang sedang bersimpangan jalan.

KONFRONTASI MARITIM

Laporan panitia ad hoc PBB mengenai Samudera Indonesia (UN Ad Hoc Committee on the Indian Ocean) dalam bulan Mei 1974 telah mencatat bahwa Uni Soviet memelihara kekuatan maritim di kawasan Samudera Indonesia

yang terdiri dari satu kapal penjelajah, lengkap dengan peluru kendali "surface to surface" dan "surface to air"; dua destroyer; tiga kapal selam (diperkirakan diperlengkapi dengan kekuatan nuklir) dan beberapa kapal-kapal logistik. Pada waktu bersamaan armada Amerika Serikat beroperasi dengan satu kapal induk yang mengangkut 90 kapal terbang; enam buah kapal destroyer dan satu kapal selam nuklir. . Kesatuan-kesatuan tugas kedua negara raksasa bersangkutan berpangkalan masing-masing di Wladiwostok dan di Subic Bay, dan beroperasi dengan jadwal waktu 6 bulan. Pada waktu terjadi suatu kondisi krisis, seperti pada waktu terjadi perang Pakistan-India, perang Arab-Israel, maka kedua belah pihak memperkuat kesatuan tugas angkatan lautnya.

Menurut catatan Military Balance¹, armada Uni Soviet di kawasan Pasifik yang berpangkalan di Wladiwostok terdiri dari 105 kapal selam, kurang lebih 40 di antaranya berkekuatan senjata nuklir; beserta 60 kapal perang utama. Sebaliknya Armada ke-7 Amerika Serikat yang berpangkalan di Subic Bay berkekuatan 3 kapal induk dan masing-masing diperlengkapi oleh 90 kapal terbang; beserta 28 kapal perang utama. Tidak tercatat jumlah kapal selam yang ada. Hal mana menimbulkan dugaan bahwa kekuatan kapal selam Amerika Serikat ditangani langsung oleh markas operasional yang lebih tinggi.

Para ahli strategi negara-negara Barat umumnya sependapat, bahwa kehadiran satuan tugas maritim Amerika Serikat di Samudera Indonesia diperlukan untuk mengisi "kekosongan" yang ditimbulkan oleh karena ditariknya kekuatan angkatan perang Inggris dari kawasan "Sebelah Timur Suez", agar dengan demikian "kekosongan" itu tidak sampai diisi oleh kekuatan "lawan". Dari pernyataan-pernyataan para pembesar Amerika Serikat digambarkan betapa pentingnya Samudera Indonesia dalam perhitungan strategis mereka. Bahkan diperkirakan dapat terjadi gejolak-gejolak utama di kawasan ini yang akan mempengaruhiimbangan kekuatan dunia. Amerika Serikat menghendaki agar Samudera Indonesia tetap terbuka bebas untuk perdagangan dan hubungan antar negara secara damai. Sebaliknya pihak Uni Soviet mengemukakan, bahwa kehadiran armada Uni Soviet

¹ Publikasi IISS, London, 1976

di kawasan Samudera Indonesia diperlukan untuk mengamankan hubungan laut di antara Uni Soviet bagian barat dan bagian timur. Dan selebihnya, menurut sumber-sumber Uni Soviet, dengan meningkatnya perdagangan Uni Soviet dengan negara-negara di sekitar Samudera Indonesia, maka diperlukan juga adanya pengamanan bidang maritim.

Infrastruktur kedua negara raksasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk menunjang operasi-operasi maritim mereka cukup mengesankan. Amerika Serikat memelihara sebuah stasiun maritim di Bahrein, di samping pembangunan sebuah pangkalan komunikasi dan logistik (refueling) di pulau Diego Garcia, yang menghubungkan stasiun telekomunikasi di Asmara (Ethiopia) dengan pusat komunikasi yang terdapat di Australia bagian barat daya. Kedua pangkalan maritim di Australia bagian barat daya, Cockburn Sound, di bagian timur dari Samudera Indonesia dan Simonstown di Afrika Selatan, untuk bagian barat dari Samudera tersedia bagi keperluan strategis Amerika Serikat, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali, karena keduanya ditunjang oleh potensi industri di kedua negara bersangkutan.

Sebaliknya Uni Soviet mendapatkan fasilitas berlabuh di kepulauan Sokotra dan Chagos, dan juga fasilitas pelabuhan di Mauritius, Aden, Vishakapatnam di India dan Umm Quasar di Irak, yang menurut sementara peninjau dinyatakan sebagai untuk keperluan armada perikanan. Didapatkan pula berita -walaupun dibantah baik oleh Uni Soviet maupun Somalia-, bahwa di Berbera-Somalia sedang dibangun sebuah pangkalan komunikasi dan peluru kendali untuk keperluan armada Uni Soviet. Sebenarnya demonstrasi persaingan kekuatan maritim kedua Super Powers di perairan Samudera Indonesia, terutama sejak awal tahun-70an, adalah merupakan suatu bagian dari adegan, yang tidak berkesudahan, dari persaingan global Amerika Serikat dan Uni Soviet.

SUPREMASI AMERIKA SERIKAT MENDAPATKAN TANTANGAN

Setelah Perang Dunia ke-II Amerika Serikat merupakan negara terkuat di dunia, baik ditinjau dari segi kemiliteran, ekonomi maupun politik. Sehingga pada waktu terjadinya Perang Korea, Amerika Serikat dengan relatif mudah berhasil mendesakkan revolusi "Uniting for Peace" di Sidang Umum PBB, yaitu suatu resolusi untuk menyusun pasukan bersenjata PBB yang terdiri dari kontingen-kontingen dari berbagai negara di bawah bendera PBB untuk menghadapi "serangan" komunis. Namun segi yang menarik dari penyelesaian perang tersebut adalah bahwa walaupun pasukan-pasukan PBB mempunyai persenjataan yang jauh lebih unggul dan pendapat dunia umumnya memihak kepada PBB, namun Perang Korea berakhir dengan tetap terbaginya Korea menjadi dua bagian. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu tantangan bagi kekuatan Amerika Serikat.

Tantangan terhadap kekuatan Amerika Serikat tersebut terlihat telah lanjut dari beberapa peristiwa dalam dasawarsa 50-an yang sangat mempengaruhi jalannya sejarah di dasawarsa-dasawarsa berikutnya, antara lain yaitu berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949; dikalahkannya pasukan-pasukan Perancis yang dibantu oleh Amerika Serikat pada tahun 1954 di Dien Bien Phu oleh tentara pembebasan rakyat di bawah Jenderal Vo Nguyen Giap, yang merupakan kekalahan kekuatan militer barat pertama kalinya setelah Perang Dunia ke-II dari pasukan-pasukan gerilya dalam suatu pertempuran konvensional; demonstrasi pembom jarak jauh oleh Uni Soviet pada tahun 1954 dan peluncuran Sputnik pada tahun 1957; penyelenggaraan Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang merupakan demonstrasi negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk usahanya memainkan peranannya sendiri. Hasil Konperensi Asia-Afrika tidak merupakan kemenangan fisik melainkan kemenangan moral, yang di kemudian hari berkembang menjadi Konperensi Non-Blok.

Kemampuan Uni Soviet di bidang teknologi dan aero-dinamika sebagaimana didemonstrasikan melalui pesawat-pesawat pembom jarak jauh dan peluncuran Sputnik serta pendirian Republik Rakyat Cina dan kemenangan tentara Vo Nguyen Giap di Dien Bien Phu telah memberikan keyakinan para

ahli strategi barat -yang sangat dipengaruhi oleh suasana setelah Perang Dunia ke-II, mengenai meluasnya pengaruh kekuatan komunis ke bagian dunia lainnya. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan berkembangnya kekuatan Uni Soviet sehingga akan mampu membom sasaran-sasaran di wilayah Amerika Serikat dan melampaui kekuatan pakta pertahanan NATO di Atlantik. Dengan landasan-landasan pemikiran demikianlah maka gagasan Amerika Serikat untuk membentuk pakta pertahanan militer di kawasan Asia bernama SEATO mendapatkan sambutan penuh dari Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru dan juga Pilipina, Muangthai dan Pakistan. Pakistan turut serta dalam pakta tersebut oleh karena kekhawatirannya yang lebih besar terhadap tingkah laku India daripada karena ancaman komunis.

Kekuatan dan keunggulan Amerika Serikat yang terdapat pada akhir Perang Dunia ke-II oleh Juergen Rohwer¹ dinyatakan sebagai lambat laun ditentang oleh perkembangan teknologi persenjataan Uni Soviet. Kedua belah pihak mampu mengembangkan peluru kendalinya, yang dapat menghancurkan sasaran-sasaran di daerah lawannya. Kekuatan-kekuatan Pakta Warsawa berkembang secara pasti sehingga lebih unggul di bidang persenjataan tank, meriam dan jumlah pasukan dibandingkan dengan pasukan-pasukan NATO. Perimbangan kekuatan bersenjata di kawasan Eropa dan Atlantik tersebut mendesak kedua Super Powers untuk mengadakan peredaan ketegangan atau yang lazim dikenal sebagai Politik Detente, khususnya untuk kawasan tersebut.

Juga perkembangan armada laut Uni Soviet, di bawah pimpinan Admiral Gorshov, telah berhasil mengubah sifatnya dari unsur patroli pantai menjadi unsur strategis yang beroperasi di hampir semua lautan dan samudera. Uni Soviet juga mengembangkan kapal penjelajah berpeluru kendali (cruise missile), yang dapat mencari sasaran lawan, misalnya kapal induk Amerika Serikat. Sebaliknya Amerika Serikat sendiripun mengembangkan peluru kendali yang dapat diluncurkan dari kapal selam nuklir dari bawah permukaan air, seperti peluru kendali Polaris II, kemudian Poseidon, kedua-duanya dengan jarak jangkau lebih dari 2500 mil laut, artinya bila diluncurkan dari wilayah Samudera Indonesia dapat mencapai sasaran di wilayah Rusia dan Siberia.

¹ Juergen Rohwer, "Super Power Confrontation on the Seas", *The Washington Papers*, 1975.

Amerika Serikat, terutama sejak menjelang berakhirnya perang Indocina yang menimbulkan reaksi kuat di kalangan luas rakyat Amerika, yang cenderung menghendaki agar tentara Amerika Serikat tidak lagi ditempatkan di daratan Asia, dan melihat kenyataan meluasnya forum-forum multilateral yang kecenderungannya menentang campur tangan negara-negara raksasa, dan umumnya bernada anti-Amerika seperti forum non-aligned, agaknya berusaha mengubah strateginya dari pertahanan di daratan berpindah kepada strategi maritim.

Berbeda dengan kondisi di kawasan Atlantik dan Eropa di mana negara-negara anggota kawasan itu merupakan pemain-pemain langsung dalam percaturan strategis dalam persaingan dua raksasa besar itu, maka di kawasan Samudera Indonesia dan Asia umumnya, terkecuali Afrika Selatan dan Australia, semua negara-negara berkembang di sekitar Samudera Indonesia umumnya hanya dianggap sebagai "hadirin" saja. Dan karena itu pula tidak mengherankan bahwa negara-negara sedang berkembang di kawasan Samudera Indonesia berusaha mendesakkan resolusi mengenai Samudera Indonesia ke dalam forum PBB, yang tercetus dalam resolusi PBB tahun 1971 yaitu "Declaration of the Indian Ocean as a zone of Peace". Hal ini disebabkan karena konfrontasi eskader-eskader angkatan laut kedua Super Powers dianggap sebagai faktor pengganggu keamanan, pengganggu stabilitas kawasan, sedangkan stabilitas itu sangat diperlukan oleh negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya itu untuk membangun dirinya.

BENIH-BENIH KONFLIK

Hampir 2000 juta manusia hidup di sekitar Samudera Indonesia, dan terkecuali Australia, Muangthai dan Afrika Selatan, semua negara-negara littoral adalah bekas jajahan. Mereka sekarang sedang dalam usaha untuk mencari polanya sendiri untuk mengelola kemerdekaan dan pembangunan suatu kehidupan yang layak sebagai manusia merdeka. Umumnya negara-negara sedang berkembang di sekitar Samudera Indonesia itu satu sama lain berbeda kondisi politik, ekonomi dan sosial yang dihadapinya, namun menghadapi perbedaan atau benih-benih pertentangan yang sama yang

bersumberkan perbedaan agama, suku, bahasa (linguistik), atau bahkan juga persepsi politik, yang merupakan unsur yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa bersangkutan dalam usaha pembangunannya.

Hampir semua negara littoral mempunyai sistem penguasaan di bawah militer, sistem satu partai atau sistem di mana praktis hanya satu partai besar yang berkuasa untuk menghadapi atau mengatasi gejala-gejolak masyarakat yang timbul karena perbedaan kesukuan, keagamaan, bahasa, bahkan juga perbedaan politik itu. Pada waktu ini gejala-gejolak itu tercetus dalam bentuk perang-perang "kecil", seperti yang terjadi di Oman; di propinsi bagian Utara India dan Pakistan; gerakan Komunis di Birma--baik golongan Red Flag ataupun White Flag bersama-sama dengan suku bangsa Karen dan Shan yang sudah puluhan tahun bertahan di daerah masing-masing; di Bagian Utara dan Selatan Muangthai yang didorong oleh motivasi etnis, agama dan ideologi; dalam masyarakat Malaysia yang multi-rasial, aktivitas komunis memanfaatkan perbedaan etnis; sedangkan di Pilipina terutama di bagian selatan dengan gerakan Muslim; dan di daerah Afrika bagian Selatan pertentangan antara negara-negara Afrika Hitam dan negara-negara Afrika minoritas putih, yang diperkirakan akan sangat tipis kemungkinannya untuk dapat diatasi.

Di samping kesulitan-kesulitan domestik yang terdapat di negara-negara di sekitar Samudera Indonesia, terdapat pula ketegangan bahkan konfrontasi yang terjadi di antara negara-negara yang baru merdeka itu sendiri, seperti ketegangan di antara Uganda dengan Tanzania; Uganda dengan Kenya; kekhawatiran Ethiopia terhadap Somalia, karena usaha Somalia untuk mempengaruhi suku-suku di daerah perbatasan; pertikaian di Oman di antara Sultan Quabush dengan bantuan Arab Saudi dan Iran di satu pihak menghadapi pemberontak-pemberontak yang dibantu oleh Republik Rakyat Yemen Selatan di lain pihak. Supremasi India yang terjadi sebagai akibat perang 1971 atas Bangla Desh telah mengalami tentangan setelah digulingkannya Mujibur Rachman oleh golongan yang tidak ingin didominir oleh negara tetangga; dan juga pertikaian di jazirah Indocina, terutama di antara Muangthai dengan negara-negara tetangganya yaitu Laos dan Khmer atau Kampuchea.

Kenyataan adanya gejolak-gejolak di beberapa negara, ditambah dengan antagonisme antar negara, telah mendorong beberapa negara untuk memperkuat persenjataannya, dan membeli persenjataan-persenjataan modern dengan harga yang tinggi, yang berarti mengurangi dana pembiayaan pembangunan untuk perlengkapan pertahanan. Hal ini dapat diperhatikan dari angka-angka dalam tabel di bawah ini yang cukup meyakinkan yaitu perbandingan pengeluaran dana untuk pertahanan dari tahun ke tahun oleh tiga negara sebagai berikut:

=====		
Dalam jutaan US dollar		
=====		
Negara	1974-1975	1975-1976
=====		
Arab Saudi	1.808	6.343
Iran	3.225	10.405
Oman	169	359
=====		

(Sumber: *The Military Balance 1974-1975 dan 1975-1976, IISS, London*).

Usaha Dr. Kissinger untuk mencari penyelesaian di Afrika bagian Selatan sebagai imbalan operasi Uni Soviet dan Kuba di Angola, ternyata malah melibatkan Amerika Serikat ke dalam pola pertikaian kekuatan antar negara Afrika. Zaire, Kenya dan Ethiopia mengajukan permintaan untuk penambahan senjata bagi angkatan perangnya masing-masing. Perubahan politik Anwar Sadat dengan menghentikan perjanjian, "Treaty of Friendship and Cooperation" dengan Uni Soviet, telah membawa Republik Rakyat Cina menjadi penjual senjata dan merupakan faktor tambahan yang harus diperhitungkan di tengah-tengah pergolakan di kawasan Timur Tengah yang tidak berkesudahan itu.

Dalam perang Indocina yang lalu, kedua Super Powers mengirimkan persenjataannya yang paling mutakhir untuk pihak-pihak yang bersengketa. Amerika Serikat bahkan tidak hanya mengirimkan senjata, tetapi juga tenaga ahli dan pasukannya yang diperkirakan mencapai jumlah sekitar 500.000 orang. Jumlah persenjataan yang ditinggalkan pasukan Amerika Serikat setelah berakhirnya perang Indocina, yang sekarang dikuasai

oleh pemerintah Republik Sosialis Vietnam, telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara tetangganya mengenai kemungkinan digunakannya dan disalurkankannya senjata-senjata tersebut untuk gerakan-gerakan pemberontak kiri di negara-negara bersangkutan. Di Afrika, Uni Soviet, Kuba, Korea Utara dan RRC juga mengirimkan senjata-senjata dan bahkan mengirimkan penasihat, pelatih ataupun pasukan untuk penyusunan pasukan gerilya, terutama di Mozambik, Angola dan Rhodesia.

Suplai persenjataan itu untuk sebagian menentukan berkelanjutan atau berakhirnya pergolakan di sesuatu daerah, sebagaimana dapat diperhatikan dari berakhirnya pemberontakan suku bangsa Kurdi di Irak dengan dihentikannya pengiriman senjata oleh Iran. Pemberian dan atau penjualan senjata ini tidak hanya mempunyai aspek politik di dalam kerangka pertikaian dua kekuatan raksasa, tetapi juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, bahkan adakalanya aspek ekonominya lebih dipentingkan daripada aspek politiknya, karena penjualan senjata sangat menguntungkan neraca pembayaran negara-negara bersangkutan. Hal-hal itulah yang mempersulit dihentikannya pergolakan-pergolakan yang ada, karena suplai persenjataan itu tidak hanya dilakukan oleh negara-negara industri besar, tetapi juga oleh negara-negara yang ingin menarik keuntungan politik, seperti bantuan senjata dari Libya yang dilaporkan tidak hanya diberikan kepada kelompok Islam di Pilipina Selatan, Palestina, tetapi bahkan juga kepada IRA (Irish Republican Army).

Pemberontakan atau pergolakan itu biasanya dimulai oleh golongan yang tidak menyetujui politik pemerintahnya, atau tidak puas karena pandangan dan atau keluhannya tidak atau kurang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada, ataupun karena merasa kurang mendapatkan "bagian rejeki", atau karena merasa bahwa identitas kelompoknya terancam oleh politik pemerintahnya. Terintegrasinya ketidakpuasan tersebut dan munculnya seorang pemimpin yang berwibawa yang dapat memadukan kelompok-kelompok yang tidak puas tersebut merupakan unsur kekuatan untuk terjadinya suatu pemberontakan, yang merupakan ciri-ciri pemberontakan di kawasan Samudera Indonesia, baik pemberontakan yang berdasarkan ideologis komunis, ataupun pemberontakan yang berdasarkan alasan-alasan etnis, agama ataupun bahasa. Kesanggupan pemberontak-pemberontak

itu untuk bertahan terhadap tekanan pasukan pemerintah merupakan unsur potensiil bagi masuknya campur tangan asing dalam kerangka persaingan negara-negara besar.

PERANAN BAHAN MENTAH

Pada masa penjajahan, perekonomian negara-negara di sekitar Samudera Indonesia diarahkan kepada produksi komoditi agraria, seperti rempah-rempah, karet, sisal, kopi dan teh, bagi pemenuhan kebutuhan negara-negara penjajah. Sedangkan hasil produksi tambang dan mineral dikirimkan ke negara-negara penjajah dalam bentuk mentah. Pada waktu sekarang, kebutuhan komoditi agraris, yang tadinya hanya diproduksi di negara-negara jajahan telah dapat dipenuhi sendiri oleh negara-negara maju dewasa ini. Namun dalam kebutuhan akan bahan-bahan tambang dan mineral dengan meningkatnya kebutuhan untuk industri maka negara-negara maju tetap membutuhkannya dari negara-negara bekas jajahan atau negara-negara sedang berkembang.

Pergolakan-pergolakan dan perkembangan percaturan politik internasional yang rupanya menghidupkan kembali suasana perang dingin, dengan aspek konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuat lebih menonjolnya kebutuhan akan minyak, uranium dan jenis-jenis logam yang diperlukan bagi perindustrian persenjataan (engineering industry). Di Amerika Serikat, 75% kebutuhan akan energinya masih tergantung dari minyak dan gas bumi, karena penggunaan nuklir dan gas dari batu bara belum cukup meyakinkan. Namun untuk pemenuhan kebutuhannya akan minyak, Amerika Serikat relatif lebih kurang tergantung dari Timur Tengah dibandingkan dengan Eropa Barat atau Jepang. Sekalipun demikian, dengan ditingkatkannya kapasitas produksi industri-industri berat maka akan lebih meningkatkan kebutuhan akan minyak dan gas.

Adapun mineral-mineral strategis di samping minyak dan uranium, yang diperlukan untuk industri berat adalah: (1) biji besi; (2) bauksit; (3) mangaan; (4) zinc; (5) tembaga; (6) nikel; (7) timah; (8) tungsten, yang tersebar di beberapa negara, antara lain di Amerika Latin: Suriname dan Guyana mengeksplor bauksit; Chili - tembaga; Peru -

tembaga dan zinc; Bolivia - timah; Jamaika - bauksit; Brasilia - mangaan. Di Afrika: Zambia dan Zaire mengeksport tembaga di samping itu Zaire juga mengeksport zinc; Gabon - mangaan; Liberia, Sierra Leone dan Mauritania - biji besi. Di Asia Selatan dan Tenggara: India mengeksport biji besi dan mangaan; Indonesia, Malaysia - timah; Pilipina - tembaga.

Negara-negara penghasil mineral dan barang tambang tersebut melihat sukses yang dicapai oleh negara-negara penghasil minyak melalui kerjasama dalam OPEC berusaha pula menempuh jalan yang sama, terutama untuk tembaga. Pada akhir tahun 1975, Indonesia ikut bergabung dalam organisasi produsen tembaga, yang beranggotakan Peru, Chili, Zaire dan Zambia. Organisasi yang terakhir ini sejauh ini belum berhasil mendapatkan pengaruh seperti kerjasama OPEC, karena berbeda dengan minyak dan gas bumi yang tidak dapat disimpan lama oleh pengimpornya, maka tembaga dan biji besi dapat disimpan lama. Sehingga melalui permainan politik harga para konsumen bahan-bahan tersebut dapat menaik-turunkan harga yang sangat merugikan produsennya, karena kemampuan perekonomian negara-negara pengimpor.

Faktor-faktor lain yang menghambat para produsen mineral strategis dari negara-negara sedang berkembang mendapatkan harga yang lebih memadai juga disebabkan oleh karena negara-negara bebas seperti Kanada, Afrika Selatan dan Australia merupakan negara pengekspor logam-logam penting. Kanada memiliki sumber-sumber pertambangan yang cukup berarti untuk jenis nikel, tembaga, biji besi, zinc dan aluminium. Australia pengekspor biji besi, mangaan, timah, zinc dan aluminium. Bila dibuat daftar negara-negara pengekspor logam tersusun menurut jumlah logam, harga dan beratnya, maka pada daftar tersebut, Kanada dan Australia, masih jauh melebihi negara-negara berkembang pengekspor logam. Juga negara-negara blok komunis memiliki potensi pertambangan yang cukup penting artinya, seperti Uni Soviet yang mengeksport biji besi, mangaan, timah, zinc dan aluminium; serta potensi Yugoslavia, Hongaria dan Polandia maupun RRC di dalam ekspor barang-barang tambang. Bahkan RRC dewasa ini menjadi menarik dengan kemampuannya untuk mengeksport minyak, yang merupakan suatu realitas baru dalam percaturan politik dan ekonomi internasional.

Negara-negara blok komunis hanya mengimpor dalam jumlah relatif kecil barang-barang mineral strategis, misalnya RRC yang mengimpor tembaga. Sebaliknya negara-negara industri Barat, karena perkembangan perindustriannya relatif lebih tergantung kepada suplai bahan-bahan mineral dari luar. Jerman Barat dan Inggris merupakan negara pengimpor dari hampir semua jenis logam, Perancis pun tidak banyak berbeda, demikian pula halnya dengan Amerika Serikat dan Jepang. Tetapi di lain pihak, negara-negara Barat memegang kunci di dalam ekspor bahan-bahan pangan, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Bahkan Uni Soviet pun mengadakan pembelian gandum dari kedua negara bersangkutan.

Menghadapi ketergantungannya akan bahan-bahan mineral yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan industrinya, negara-negara Barat mempunyai reaksi yang berbeda-beda sebagaimana diperlihatkan dalam menanggapi embargo minyak yang terjadi pada waktu perang Arab-Israel pada tahun 1973. Amerika Serikat yang menyadari kemampuan militernya bahkan mengancam untuk mengadakan invasi militer ke daerah produsen minyak Arab, sebaliknya negara-negara Eropa Barat dan Jepang berusaha mencari akomodasi dengan negara-negara produsen minyak di Timur dengan mengirimkan delegasi-delegasi kaliber tinggi mereka.

PANGAN UNTUK NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Bila negara-negara di Asia dan Afrika pada masa lalu dapat menghasilkan cukup pangan untuk penduduknya, bahkan dapat mengekspornya, maka kini karena faktor-faktor seperti eksplosi penduduk, bencana alam, peperangan, gangguan keamanan dalam segala macam bentuknya, telah menjadikan Asia dan Afrika sebagai pengimpor pangan. Dan terdapat kecenderungan bahwa negara-negara yang sanggup mengeksport pangan dalam nilai yang cukup berarti hanyalah negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan dan Australia, dan dengan harga yang relatif sangat tinggi. Negara-negara yang mengimpor bahan pangan tersebut bukan hanya terbatas kepada negara-negara sedang berkembang saja, tetapi juga hingga meliputi negara-negara besar seperti

Uni Soviet yang biasanya mengimpor pangan dari Amerika Serikat dan RRC yang biasanya mengimpor dari Kanada dan Australia. Pedagang-pedagang pangan (merchants of grain) negara-negara tersebut menurut Dan Morgan¹ merupakan pedagang-pedagang multinasional yang tidak berbeda dengan pengusaha-pengusaha minyak raksasa yang mendapat julukan "the Seven Sisters" tersebut.

Persoalan pangan bagi negara-negara sedang berkembang, yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, telah mencapai satu titik yang sangat gawat. Pada tahun 1974 di Bukarest dan kemudian tahun 1975 di Roma berturut-turut diadakan Konperensi PBB mengenai pangan dan kependudukan (UN Conference on food dan UN Conference on population). Kedua konperensi tidak berhasil mencapai sepakat untuk memberikan jawaban dalam mengatasi masalah pangan dan kependudukan. Walaupun para ahli dan teknokrat PBB telah menyampaikan angka-angka statistik yang suram mengenai kondisi jutaan manusia yang hidup dalam tingkat di bawah layak, namun negara-negara kaya tampaknya tidak bersedia untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Dan juga konperensi menjadi kabur dengan pidato-pidato yang lebih bernada dan bersifat politis daripada pragmatis.

Pangan merupakan barang yang sangat penting di samping pengadaan sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan bagi kesejahteraan jutaan penduduk di dunia, dan senantiasa masih merupakan masalah yang sangat pelik bagi negara-negara di kawasan Samudera Indonesia khususnya. Permasalahan ini timbul mungkin disebabkan juga karena kurang mampunya pemerintah-pemerintah negara-negara berkembang dalam menangani pengadaan dan distribusi kebutuhan rakyat tersebut, atau karena kurang trampilnya aparatur yang ada atau karena tidak cukupnya dana yang tersedia, ataupun karena alasan-alasan lain.

PERANAN LINTAS LAUT DAN SELAT

Untuk keperluan penyaluran, baik pangan maupun komoditi-komoditi, termasuk di antaranya penyaluran bahan-bahan energi minyak dan logam untuk keperluan kehidupan berjuta-juta umat manusia di negara-negara

¹ *Guardian Weekly*, 24 Januari, 1 dan 8 Pebruari 1976.

sedang berkembang maupun negara-negara industri, maka pengangkutan melalui laut dan selat memegang peranan yang sangat penting artinya. Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, volume perdagangan menjadi sangat meningkat, dan hampir semuanya mempergunakan sarana angkutan laut, karena pembiayaannya yang relatif masih jauh lebih murah dibandingkan sarana angkutan lainnya yang dapat menghubungkan tempat-tempat di bagian dunia ini.

Semua negara-negara di dunia ini, baik negara-negara sedang berkembang maupun negara-negara maju terlibat dalam aktivitas di lautan, untuk kepentingan ekspornya ataupun untuk impornya. Dan negara-negara itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan dengan tujuan luhur, yaitu untuk memelihara perdamaian di dunia dan menyelesaikan konflik-konflik di antara anggotanya melalui perundingan-perundingan. Namun perkembangan yang ada menunjukkan bahwa cita-cita luhur PBB belum dapat dihayati sepenuhnya.

Masalah penguasaan lautan dan selat merupakan masalah yang telah berlangsung sangat lama dan tidak berkesudahan hingga dewasa ini. Pada akhir abad ke-XV Sri Paus dengan pengaruhnya melalui Dekrit Sri Paus telah membagi dunia di antara Super powers waktu itu, yaitu Spanyol dan Portugal. Samudera Indonesia ditempatkan di bawah kekuasaan Portugal. Periode itu pada hakekatnya dapat dinyatakan sebagai awal dari jaman penjajahan. Portugal melalui kekuatan angkatan lautnya berhasil menguasai rute pelayaran yang menguasai jalur perdagangan Asia dan Eropa Barat. Keberhasilan Portugal tersebut kemudian mendapatkan saingan dari kapal-kapal perang Belanda, Inggris dan Perancis. Sejak tahun 1815 dengan kekalahan yang diderita Napoleon, maka Inggris praktis merupakan satu-satunya penguasa Samudera Indonesia, Samudera Atlantik dan Laut Tengah. Untuk mengamankan kekuasaannya itu maka Inggris membangun pangkalan-pangkalan angkatan laut dari Gibraltar melalui Malta, Aden, Kolombo sampai ke Singapura. Setelah Perang Dunia ke-II, kondisi strategis berubah dan Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya Super Power yang berhasil menguasai perairan di seluruh dunia melalui kekuatan persenjataan modernnya dan kekuatan ekonominya.

Perkembangan setelah tahun-tahun itu menunjukkan tiga gejala penting yang ditanggapi oleh para pemikir strategi Amerika Serikat sebagai faktor-faktor yang mengurangi keunggulan Amerika Serikat sebagai Super Power yang terkuat. Pertama, kemampuan Uni Soviet untuk mengembangkan teknologi persenjataan dan peralatan sehingga dapat mencapai paritas di bidang persenjataan peluru kendali, angkatan laut, udara maupun darat konvensional. Dan juga pengaruh politik yang berhasil dikembangkan Uni Soviet di Eropa Timur, Asia Timur dan negara-negara berkembang lainnya. Kedua, lahirnya negara-negara baru dengan nasionalisme yang tinggi sebagai proses dekolonisasi dalam banyak hal perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Amerika Serikat, yang memperkirakan bahwa negara-negara yang baru merdeka itu akan berkembang sebagai negara-negara dengan sistem demokrasi yang lazim berlaku di negara-negara Barat. Ketiga, batas teritorial laut sejauh 3 mil dari pantai yang berlaku sejak sebelum Perang Dunia ke-II dewasa ini telah berkembang menjadi 12 mil dari pantai, dan bahkan ada yang mengusulkan untuk lebih dari itu. Hal ini mengakibatkan bahwa beberapa selat yang strategis, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Ombra-Wetar, Selat Mozambik, dan lain-lain berubah status menjadi perairan domestik dan berarti mengurangi kebebasan bergerak kapal-kapal niaga dan kapalkapal perang yang menyeberangi lautan dan harus melewati selat dan menyelusuri tanjung.

Peranan Selat di dalam pelayaran internasional baik untuk kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal perang mempunyai arti yang sangat besar, dan kebebasan Bergeraknya banyak ditentukan oleh sikap negara yang berbatasan dengan selat-selat bersangkutan. Perairan di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan ataupun Selat Torres yang terletak di antara Indonesia dan Australia sampai sekian jauh tetap terjamin untuk pelayaran kapal-kapal perang dan niaga barat. Tapi lain halnya dengan Selat Mozambik yang berbatasan dengan Republik Malagasi dan Mozambik, yang kedua-duanya berhaluan kiri. Begitu pula halnya dengan Selat Bab El Mandeb, dengan ditinggalkannya pangkalan angkatan laut Perancis di Jiboutti, maka selat itu praktis berada di bawah pengaruh Somalia, Yemen Selatan dan Jiboutti yang semuanya berhaluan kiri.

PERSPEKTIF SEKURITI - GAMBARAN KOMPLEKS

Makin kuatnya partai-partai komunis di Eropa Barat bagian selatan, kemenangan MPLA di Angola dengan bantuan senjata dan "penasehat" dari Uni Soviet dan Kuba, meningkatnya produksi persenjataan Uni Soviet dan juga ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin Uni Soviet yang secara terbuka menyatakan bahwa detente tidak berarti penghentian penyebaran ideologi komunis, telah menyebabkan timbulnya kekhawatiran di sementara kalangan di Amerika Serikat, Eropa Barat dan Australia. Dan makin menimbulkan kesan bahwa politik detente yang terjadi dewasa ini sudah menjadi semu.

Namun di lain pihak, dapat pula diperhatikan bahwa pengaruh Uni Soviet juga sudah mulai mengalami perubahan-perubahan yang tidak kurang artinya dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi negara-negara Barat. Bila Amerika sudah "kalah" di Vietnam, maka Uni Soviet pun mengalami "kekalahan" di Mesir dengan dihentikannya perjanjian persahabatan dan kooperasi (Treaty of Friendship and Cooperation) oleh Presiden Anwar Sadat. Di Sudan pengaruh Uni Soviet juga sudah mulai menurun. Sedangkan di Irak, dengan berhentinya pemberontakan suku Kurdi karena dihentikannya bantuan Iran kepada kelompok pemberontakan tersebut, serta hubungan pendekatan kembali di antara Irak dan Iran, telah menyebabkan Irak berada pada posisi yang relatif lebih "kenyal" terhadap Uni Soviet. Jalannya Konferensi Partai-Partai Komunis di Eropa yang berlangsung di Berlin Timur menunjukkan adanya kerenggangan hubungan monolitik kelompok komunis di bawah "pembina tunggal" Uni Soviet. Sedangkan hubungan Uni Soviet dan RRC belum juga membaik, bahkan pendekatan strategis Amerika Serikat terhadap RRC telah membuat hubungan segi tiga politis baru di antara Amerika Serikat, RRC dan Uni Soviet. Sikap Australia di bawah PM Malcolm Fraser secara tegas mengutuk kehadiran Uni Soviet di Samudera Indonesia dan bahkan menilai kehadiran misi dagang Uni Soviet di daerah Tonga Pasifik Selatan sebagai infiltrasi, serta usaha pendekatannya kepada Amerika Serikat dan RRC agar membentuk suatu garis kerjasama baru Amerika Serikat-RRC-Australia di dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet.

Menarik di dalam permasalahan imbalan kekuatan di Samudera Indonesia adalah juga keputusan Kongres Amerika Serikat pada pertengahan tahun ini yang telah memberikan persetujuannya untuk pengembangan Kepulauan Diego Garcia sebagai pangkalan komunikasi dan logistik armada AS. Keputusan ini berarti kehadiran angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Samudera Indonesia menjadi suatu kehadiran yang lebih permanen sifatnya. "Realitas" Diego Garcia itu berarti pula, bahwa pertikaian di antara kedua Super Powers di kawasan Samudera Indonesia akan senantiasa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keamanan kawasan.

Keadaan itu menjadi lebih relevan dengan kenyataan adanya kondisi-kondisi krisis, seperti Perang Timur Tengah, Krisis di Oman, Pemberontakan di Birma, Krisis perbatasan Muangthai-Laos, Ketegangan di India, Malaysia dan Filipina, di samping ketegangan-ketegangan di Afrika bagian Selatan, Afrika Timur. Krisis-krisis tadi berasal dari kondisi-kondisi setempat, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya akan dapat melibatkan unsur-unsur asing.

Krisis-krisis tadi, hingga dewasa ini, masih dinilai dalam rangka tata-nilai (value system) yang lazim berlaku pada waktu masa perang diinginkan masih menghebat. Cara berpikir dan usaha mencari jawaban masih terpaku kepada pola pertentangan bipolar, padahal kenyataan menunjukkan bahwa penjualan senjata negara-negara maju kepada negara-negara sedang berkembang tidak lagi mengikuti pola tersebut. Sejak 1954 Perancis telah menjual senjatanya juga kepada Israel, walaupun Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sebelumnya telah sepakat untuk tidak menjual senjata ke kawasan Timur Tengah. Juga Cekoslowakia telah mulai menjual senjata ke Mesir, yang tadinya merupakan daerah monopoli pemasaran senjata Inggris. Perancis bahkan pada tahun 1970 juga sudah menjual pesawat Mirage ke Libya. Semua ini agaknyalah lebih dititikberatkan karena pertimbangan ekonomis daripada politis, ataupun strategis.

Di bidang ekonomi, peranan bahan mentah seperti minyak bumi dan logam maupun pangan makin meningkat artinya sebagai faktor strategis. Kalau bahan minyak bumi dan logam diperuntukkan bagi negara-negara industri maju, maka sebaliknya bahan pangan sangat diperlukan oleh negara-negara sedang berkembang dan juga negara-negara sosialis seperti Uni Soviet

dan RRC sekalipun, yang suplainya sangat tergantung dari kesediaan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia.

Semangat nasionalisme negara-negara sedang berkembang yang umumnya juga menjadi sumber bahan-bahan tambang dan minyak bagi kebutuhan industri belum atau tidak ditanggapi sebagai faktor "aman" atau "bersahabat" oleh negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Sedangkan usaha pembangunan masyarakat negara-negara sedang berkembang yang umumnya telah lama menderita di bawah penjajahan tidak dapat mengharapkan dari bantuan negara-negara industri, sekalipun PBB dalam DD-I (Development Decade-I) telah menetapkan agar negara-negara industri maju menyumbangkan 1% dari GNP-nya untuk kepentingan negara-negara miskin.

Kenyataan-kenyataan di atas membuat dunia ini makin terbagi kepada dua pola pertentangan baru yaitu di antara negara-negara kaya yang umumnya terletak di belahan utara dan negara-negara sedang berkembang yang umumnya terletak di belahan selatan. Perbedaan Utara-Selatan makin lebih menonjol sementara perbedaan atau pertentangan Barat-Timur, atau Dunia Komunis dan Dunia Bebas, belum pula mereda.

Pada akhir abad ke-XX jumlah penduduk di sekitar Samudera Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 3.000 juta jiwa, artinya kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan akan juga meningkat, sementara pertikaian atau gangguan keamanan di dalam negeri ataupun antara negara-negara yang berdekatan belum terlihat tanda-tanda akan mereda, ditambah pula dengan persaingan atau perlombaan kedua Super Powers yang masih senantiasa meningkat sekalipun telah dapat dicapainya politik Detente untuk kawasan Atlantik dan Eropa.

Pemerintah-pemerintah negara-negara sedang berkembang di sekitar kawasan Samudera Indonesia di dalam menghadapi perkembangan kompleks demikian, perlu sekarang juga menyusun dan mencari Model Strategi Pembangunan yang sekaligus dapat mencakup usaha yang akan mampu mengatasi faktor-faktor domestik dan juga politik luar negeri yang dapat mengatasi pertentangan-pertentangan ganda, ialah pertarungan Timur dan Barat dan pertentangan Utara dan Selatan, dengan memperhatikan kenyataan bahwa bantuan dari negara-negara maju tidak sesuai dengan harapan negara-negara sedang berkembang.**

LAMPIRAN I

Twenty-sixth session
Agenda item 98

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
= on the report of the First Committee (A/8584) =

2832 (XXVI). Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace
The General Assembly,

Conscious of the determination of the peoples of the littoral and hinterland States of the Indian Ocean to preserve their independence, sovereignty and territorial integrity, and to resolve their political, economic and social problems under conditions of peace and tranquillity,

Recalling the Declaration of the Third Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Lusaka in September 1970, calling upon all States to consider and respect the Indian Ocean well as bases conceived in the context of such rivalries and competition should be excluded, and declaring that the area should also be free of nuclear weapons,

Convinced of the desirability of ensuring the maintenance of such conditions in the Indian Ocean area by means other than military alliances, as such alliances entail financial and other obligations that call for the diversion of the limited resources of the States of the area from the more compelling and productive task of economic and social reconstruction and could further involve them in the rivalries of power blocs in a manner prejudicial to their independence and freedom of action, thereby increasing international tensions,

Concerned at recent developments that portend the extension of the arms race into the Indian Ocean area, thereby posing a serious threat to the maintenance of such conditions in the area,

Convinced that the establishment of a zone of peace in the Indian Ocean would contribute towards arresting such developments, relaxing international tensions and strengthening international peace and security,

Convinced further that the establishment of a zone of peace in an extensive geographical area in one region could have a beneficial influence on the establishment of permanent universal peace based on equal rights and justice for all, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

1. Solemnly declares that the Indian Ocean, within limits to be determined, together with the air space above and the ocean floor subjacent thereto, is hereby designated for all time as a zone of peace;

2. Calls upon the great Powers, in conformity with this Declaration, to enter into immediate consultations with the littoral States of the Indian Ocean with a view to:

(a) Halting the further escalation and expansion of their military presence in the Indian Ocean;

(b) Eliminating from the Indian Ocean all bases, military installations and logistical supply facilities, the disposition of nuclear weapons and weapons of mass destruction and any manifestation of great Power military presence in the Indian Ocean conceived in the context of great Power rivalry;

3. Calls upon the littoral and hinterland States of the Indian Ocean, the permanent members of the Security Council and other major maritime users of the Indian Ocean, in pursuit of the objective of establishing a system of universal collective security without military alliances and strengthening international security through regional and other co-operation, to enter into consultations with a view to the implementation of this Declaration and such action as may be necessary to ensure that:

(a) Warships and military aircraft may not use the Indian Ocean for any threat or use of force against the sovereignty, territorial

integrity and independence of any littoral or hinterland State of the Indian Ocean in contravention of the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

(b) Subject to the foregoing and to the norms and principles of international law, the right to free and unimpeded use of the zone by the vessels of all nations is unaffected;

(c) Appropriate arrangements are made to give effect to any international agreement that may ultimately be reached for the maintenance of the Indian Ocean as a zone of peace;

4. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its twenty-seventh session on the progress that has been made with regard to the implementation of this Declaration;

5. Decides to include in the provisional agenda of its twenty-seventh session an item entitled "Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace".

2022nd plenary meeting,

16 December 1971.

LAMPIRAN II

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 3080 (XXVIII) OF 6 DECEMBER 1973

The General Assembly,

Recalling its resolution 2832 (XXVI) of 16 December 1971, entitled "Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace",

Reaffirming its conviction that action in furtherance of the objectives of the Declaration would be a substantial contribution to the strengthening of international peace and security,

Noting the report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean¹, established by General Assembly resolution 2992 (XXVII) of 15 December 1972 to study the implications of the proposal, with special reference to the practical measures that may be taken in furtherance of the objectives of Assembly resolution 2832 (XXVI), having due regard to the security interests of the littoral and hinterland States of the Indian Ocean and the interests of any other State consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Noting with satisfaction the progress made by the Ad Hoc Committee in fulfilling its mandate,

1. Urges all States to accept the principles and objectives contained in General Assembly resolution 2832 (XXVI), entitled "Declaration of the Indian Ocean as a zone of peace", as a constructive contribution to the strengthening of regional and international security;

2. Requests the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean to continue its work, to carry out consultations in accordance with its mandate and to report with recommendations to the General Assembly at its twenty-ninth session;

¹Official Records of the General Assembly, Twenty-eight Session, Supplement No. 29 (A/9029).

3. Urges all States, especially the major Powers, to extend their co-operation to the Ad Hoc Committee in the discharge of its functions;

4. Requests the Secretary-General to continue to render all necessary assistance to the Ad Hoc Committee;

5. Decides that the Ad Hoc Committee shall be provided with summary records of its proceedings;

6. Requests the Secretary-General to prepare a factual statement of the great Powers' military presence in all its aspects, in the Indian Ocean, with special reference to their naval deployments, conceived in the context of great Power rivalry;

7. Recommends that the statement should be based on available material and prepared with the assistance of qualified experts and competent bodies selected by the Secretary-General;

8. Requests that the statement be transmitted to the Ad Hoc Committee at an early date, if possible by 31 March 1974;

9. Decides to include in the provisional agenda of its twenty-ninth session an item entitled "Implementation of the Declaration on the Indian Ocean as a Zone of Peace".

LAMPIRAN III

KUALA LUMPUR DECLARATION

We the Foreign Ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and the Special Envoy of the National Executive Council of Thailand,

FIRMLY believing in the merits of regional cooperation which has drawn our countries to cooperate together in the economic, social and cultural fields in the Association of South East Asian Nations;

DESIROUS of bringing about a relaxation of international tension and of achieving a lasting peace in South East Asia;

INSPIRED by the worthy aims and objectives of the United Nations, in particular by the principles of respect for the sovereignty and territorial integrity of all States, abstention from the threat or use of force, peaceful settlement of international disputes, equal rights and self-determination and non-interference in the internal affairs of States;

BELIEVING in the continuing validity of the "Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation" of the Bandung Conference of 1955 which, among others, enunciates the principles by which states may coexist peacefully;

RECOGNISING the right of every state, large or small, to lead its national existence free from outside interference in its internal affairs as this interference will adversely affect its freedom, independence and integrity;

DEDICATED to the maintenance of peace, freedom and independence unimpaired;

BELIEVING in the need to meet present challenges and new developments by cooperating with all peace and freedom loving nations, both within and outside the region, in the furtherance of world peace, stability and harmony;

COGNIZANT of the significant trend towards establishing nuclear-free zones, as in the "Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapon in Latin America" and the Lusaka Declaration proclaiming Africa a nuclear-free zone, for the purpose of promoting world peace and security by reducing the areas of international conflict and tension;

REITERATING our commitment to the principle in the Bangkok Declaration which established ASEAN in 1967, "that the countries of South East Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their people";

AGREEING that the neutralization of South East Asia is a desirable objective and that we would explore ways and means of bringing about its realization, and

CONVINCED that the time is propitious for joint action to give effective expression to the deeply felt desire of the peoples of South East Asia to ensure the conditions of peace and stability indispensable to their independence and their economic and social well-being;

DO HEREBY STATE

- (1). that Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand are determined to exert initially necessary efforts to secure the recognition of and respect for, South East Asia as a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, free from any form or manner of interference by outside Powers;

- (2) that South East Asian countries should make concerted efforts to broaden the areas of cooperation which would contribute to their strength, solidarity and close relationship.

Done at Kuala Lumpur on Saturday, the 27th of November, 1971.

On behalf of the Republic of Indonesia:

(ADAM MALIK)

Minister of Foreign Affairs.

On behalf of Malaysia:

(TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN)

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.

On behalf of the Republic of the Philippines:

(CARLOS P. ROMULO)

Secretary of Foreign Affairs.

On behalf of the Republic of Singapore:

(S. RAJARATNAM)

Minister of Foreign Affairs.

On behalf of the Kingdom of Thailand:

(THANAT KHOMAN)

Special Envoy of the National Executive Council.

LAMPIRAN IV

STRAITS AND CHANNELS IN AND ADJOINING THE INDIAN OCEAN

	<u>Littorals</u>	<u>Geographical situation</u>	<u>Narrowest stretch</u> (nautical miles)
Straits of Tiran	Egypt/Saudi Arabia	Entrance to Gulf of Aqaba at NE end of Red Sea	
Gulf of Suez		NW arm of the Red Sea, S end of Suez Canal	
Bab el Mandeb	Territory of the Afars and the Issas/ Democratic Yemen	S entrance to Red Sea	14
Strait of Hormuz	Iran/Muscat and Oman	Entrance to Persian Gulf	21
Palk Strait	Sri Lanka/India	Through Adams Bridge	3
Basilan passage	Philippines	Between Mindanao and Sulu archipelago	7
Balabac passage	Malaysia/ Philippines	Between Palawan and Sabah	27
Sibutu passage	Philippines	In Sulu archipelago near Sabah	18
Bangka passage	Indonesia	Between Bangka island and smaller islands to north	19
Selat Grehund	Indonesia	Between off-shore islands of Celebes to E	10
Makassar Strait	Indonesia	Between Borneo and Celebes (without regard to off-shore islands)	62

	<u>Littorals</u>	<u>Geographical situation</u>	<u>Narrowest stretch</u> (nautical miles)
Koti passage	Indonesia	Off NW coast of Borneo	10
Sersasan passage	Indonesia	Off NW coast of Borneo	23
Api passage	Indonesia	Off NW coast of Borneo	16
Selat Ombai	Indonesia/Portugal	Between Alor and Portuguese Timor	16
Selat Roti	Indonesia	Between Roti and Timor	6
Selat Sape	Indonesia	Between Komoda and Sumbawa	8
Selat Alas	Indonesia	Between Lombok and Sumbawa	5
Selat Lombok	Indonesia	Between Bali and Lombok	11
Selat Bali	Indonesia	Between Bali and Java	2
Selat Sunda	Indonesia	Between Java and Sumatra (not taking into account Pulau Sangiang in middle of Strait)	12
Gaspar Strait	Indonesia	Between Bangka and Billiton	8
Selat Bangka	Indonesia	Between Bangka and Sumatra	8
Berhala Strait	Indonesia	Between Singkep and Sumatra	9
Strait of Malacca	Indonesia/Malaysia	Between Malaysia (W Johore) and S. Sumatra	20

	<u>Littorals</u>	<u>Geographical situation</u>	<u>Narrowest stretch (nautical miles)</u>
Singapore (Riau) Straits	Singapore/Indonesia Riau Islands		8
Wetar	Portuguese E. Timor/ S. Moluccus	From Timor Sea to Banda Sea	
Torres Strait	Australia (Cape York)/ Papua		
Bass Strait	Australia (Victoria)/ Tasmania		
Mozambique	Portugal Mozambique/ Malagasy (Madagascar)		250

The Suez Canal is 100 nautical miles long, 34 feet deep (original depth) and 197 feet wide at its bottom.